KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Modernisasi pengawasan ESDM, berantas tambang ilegal, perkuat penegakan hukum
Tanggal : Minggu, 07 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Modernisasi Pengawasan ESDM

Berantas Tambang Ilegal, Perkuat Penegakan Hukum

Senayan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Tujuannya, untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.



Yulisman

ANGGOTA Komisi XII DPR Yulisman mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto menutup tambang ilegal harus direspons dengan langkah cepat dan konkret. Caranya melalui peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), modernisasi teknologi pengawasan, hingga koordinasi lintas Aparat Penegak Hukum (APH).

"Komitmen Presiden harus diterjemahkan dalam *roadmap* nasional, pemanfaatan teknologi modern seperti drone dan big data analytics. Serta protokol koordinasi permanen dengan Polri, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Daerah," kata Yulisman, Sabtu (6/9/2025).

Dalam Rencana Kerja 2026, Ditjen Gakkum ESDM sudah menyiapkan penggunaan drone, GPS, metering otomatis dan sistem ICT untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Namun, langkah itu harus disertai peta jalan yang jelas agar modernisasi pengawasan berdampak nyata.

Dia menekankan perlunya target terukur, mulai dari jumlah titik rawan yang dipantau, jumlah kasus ilegal yang ditindak, hingga potensi penerimaan negara yang diselamatkan.

"Potensi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang hilang akibat tambang ilegal sangat besar. Gakkum harus menghitung resmi kerugian negara dan menetapkan target pemulihan sebagai indikator kinerja utama," ujarnya.

Politikus Golkar itu juga menyoroti lemahnya koordinasi antar APH yang selama ini berjalan parsial. Karena itu, perlu protokol koordinasi permanen agar penindakan tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga memberikan efek jera serta menyelamatkan aset negara.

"Mekanisme pemulihan lingkungan pasca-penindakan juga wajib disiapkan agar pemberantasan tambang ilegal tidak meninggalkan konflik sosial maupun lahan kritis," tegasnya.

Komisi XII DPR, lanjut Yulisman, berkomitmen mengawal modernisasi pengawasan berbasis teknologi, integrasi data lintas APH, harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Serta, evaluasi tahunan terhadap dampak pemberantasan tambang ilegal terhadap PNBP dan tata kelola sumber daya alam.

"Dengan langkah terintegrasi, kita bisa wujudkan kedaulatan energi, perlindungan lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara," kata legislator asal Riau itu.

Senada, anggota Komisi XII DPR Jalal Abdul Nasir menilai, penguatan Gakkum bagian penting dari penataan tata kelola sektor ESDM yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Gakkum ESDM jangan sekadar menjadi simbol kelembagaan, tapi benar-benar menjalankan fungsi preventif, koretif, dan represif secara profesional serta transparan.

"Gakkum ESDM harus mampu memberikan efek jera, mendorong kepatuhan regulasi teknis, lingkungan, dan sosial. Juga perlu berkolaborasi dengan Polri, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan melibatkan masyarakat dalam sistem pelaporan dan pengawasan partisipatif," jelas politikus PKS itu.

Menurut Jalal, lemahnya pengawasan selama ini menyebabkan maraknya tambang rakyat tanpa izin, lemahnya rehabilitasi lingkungan oleh tambang besar, hingga konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat. Karena itu, perkuat pengawasan berbasis teknologi seperti monitoring real-time, satelit, digitalisasi, keterbukaan data IUP dan status reklamasi, hingga keadilan distribusi manfaat tambang bagi daerah penghasil.

Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae melaporkan, dalam dua bulan terakhir pihaknya sudah melakukan tiga penindakan. Salah satunya, membongkar tambang ilegal di Cibinong, Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi PNBP melalui tata kelola stockpile bauksit di Bintan.

"Pemetaan wilayah tambang ilegal telah dilakukan, mencakup batubara, nikel, hingga mineral lain. Targetnya September 2025 seluruh kesiapan data, personel dan anggaran sudah lengkap," pungkas Rilke. ■ TIF